

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM PELAYANAN PENERBITAN KTP-ELEKTRONIK (KTP-EL) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH

DIMAS DWIREZA

NPP 30.0014

Asdaf Aceh Utara, Provinsi Aceh

Program Studi Kebijakan Publik

Gmail: dimasdwireza2018@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Meliasta Hapri Tarigan, AP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The Population Administration Information System (SIAK) is an integrated application that aims to assist the government in increasing the effectiveness of data and information management on a national and regional scale regarding the results of population registration and civil registration that are accurate, complete, and up-to-date.* **Purpose:** *This study aims to find out how far the Implementation of the Use of the Population Administration Information System in the KTP-el Issuance Service at the Population and Civil Registration Office of North Aceh Regency, the obstacles experienced by the SIAK System in the KTP-el issuance service, and what efforts were made in overcoming barriers to using the SIAK system in KTP-el services.* **Methods:** *This study uses a qualitative research design with a descriptive method and an inductive approach.* **Results/Findings:** *Supporting factors in the implementation of the Population Administration Information System (SIAK) policy in North Aceh District such as organizational size, clarity of functions, working relationships, clarity of direction, consistency, implementation, budget, facilities and infrastructure in implementing policies that are good and appropriate SOUP. While the inhibiting factors of the implementation of the Population Administration Information System (SIAK) policy in North Aceh Regency are such as the limited number of population and civil registration service employees in North Aceh district in Siak services, lack of employee competency, lack of socialization to the community and failure of Siak registration through online registration. Efforts are being made to improve the implementation of the Population Administration Information System (SIAK) policy in North Aceh District such as: conducting training, conducting outreach either directly or through social media, conducting evaluations of the online service system.* **Conclusion:** *the use of SIAK in the implementation of e-KTP issuance services has been going well, although there are still deficiencies, namely network disturbances in the SIAK system so that services stop, as well as limitations in service program innovation which results in services only being able to be carried out at the Service office.*

Keywords: *Implementation, SIAK System, KTP-el.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sebuah aplikasi terpadu yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Penerbitan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, kendala yang dialami Sistem SIAK dalam pelayanan penerbitan KTP-el, serta upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penggunaan Sistem SIAK dalam pelayanan KTP-el. **Metode :** Penelitian ini penulis menggunakan Desain Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif dan pendekatan Induktif. **Hasil/Temuan :** Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Aceh Utara seperti besaran organisasi, kejelasan fungsi, hubungan kerja, kejelasan arahan, konsistensi, penerapan ,anggaran ,sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah baik dan sesuai SOP. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Aceh Utara yaitu sebagai seperti terbatasnya pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten aceh utara dalam pelayanan siak, kurangnya kompetensi pegawai, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kegagalan pendaftaran siak melalui pendaftaran secara online .Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Aceh Utara seperti : melakukan pelatihan, melakukan sosialisasi baik secara langsung atau melalui media sosial,melakukan evaluasi dari sistem pelayanan online. **Kesimpulan:** penggunaan SIAK dalam implementasi pelayanan penerbitan KTP-el sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada kekurangan yaitu mengenai gangguan jaringan pada sistem SIAK sehingga pelayanan terhenti, serta keterbatasan inovasi program pelayanan yang mengakibatkan pelayanan hanya bisa dilakukan di kantor Dinas.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem SIAK, KTP-el.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tugas pemerintah ialah pelaksanaan pelayanan publik. Sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa tujuan dari penyelenggaraan pelayanan untuk memberikan hak, kewajiban, kewenangan serta tanggung jawab kepada seluruh pihak yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik sebagai sebuah bentuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik ialah pelayanan di bidang administrasi kependudukan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam administrasi kependudukan, salah satu bentuk dokumen kependudukan yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Diharapkan dengan adanya SIAK masyarakat dapat menjalankan tertib administrasi menjadi efektif.

Kelebihan dari adanya sistem ini ialah mampu memberikan *database* kependudukan menjadi *update*, yang dapat diakses kapanpun secara langsung sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan adanya SIAK yang diberlakukan secara *online* diharapkan khususnya mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam proses penerbitan KTP-elektronik (KTP-el). SIAK bertujuan meningkatkan kualitas pelayan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Tabel 1

Jumlah Wajib Kartu Tanda Penduduk (WKTP) Belum Rekam Tahun 2022

No	Kabupaten /Kota	WKTP	Semula			Progres			Penambahan perekaman
			Rekam	Belum rekam	%	Rekam	Belum rekam	%	
	Kab. Aceh Utara	406,751	401,558	5,193	98.7	401,856	4,895	98.8	298

Sumber : Diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa masih ada 4,895 penduduk yang masih belum rekam E-KTP dikarenakan beberapa masalah yang dikeluhkan seperti sering terjadinya gangguan jaringan yang menghambat aktivitas pelayanan, ditambah lagi banyak peralatan elektronik yang tidak layak pakai lagi, dan juga Sumber Daya Manusia masih ada yang belum bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, serta kondisi gedung kantor yang kurang memadai dan inilah yang mempengaruhi sistem SIAK belum efektif. Termasuk didalamnya peningkatan pelayanan dalam pengurusan KTP-el yang masih dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah yang dikeluhkan seperti sering terjadinya gangguan jaringan yang menghambat aktivitas pelayanan, ditambah lagi banyak peralatan elektronik yang tidak layak pakai lagi, dan juga Sumber Daya Manusia masih ada yang belum bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, serta kondisi gedung kantor yang kurang memadai dan inilah yang mempengaruhi sistem SIAK belum efektif. Termasuk didalamnya peningkatan pelayanan dalam pengurusan KTP-el yang masih dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pencatatan sipil maupun aplikasi administrasi pendaftaran penduduk. Penelitian pertama dilakukan oleh Lestari, Florence Daicy Jetty Lengkong, Gustaaf. B. Tampi, 2016, dengan judul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Hasil penelitian kesiapan dalam pelayanan pengurusan E-KTP kurang baik serta belum terlalu memuaskan beberapa pelayanan yang harus ditingkatkan lagi mutu kerja dan pelayanannya sehingga bisa lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Alexandi Giawa, 2018, dengan judul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam proses pelayanan di dinas kependudukan dan Catatan sipil di kabupaten nias selatan. Hasil penelitian bahwa penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten nias adalah baik atau berhasil karena mencapai angka 74,26% dari angka yang dihipotesiskan peneliti yaitu minimal 70%.

Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Jon Fredi Purba, 2018, dengan judul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Hasil penelitian implementasi SIAK tentang pengurusan KTP-EI belum maksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan dan belum memiliki Peraturan Daerah secara khusus di kantor Camat Medan Baru Kota Medan, sehingga masih banyak yang perlu untuk dibenahi.

Penelitian sebelumnya yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Hamka Digjaya, 2009, dengan judul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (siak) dalam rangka pembuatan ktp nasional di kabupaten sambas. Hasil penelitian bahwa implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pembuatan KTP Nasional di Kabupaten Sambas tahun 2009 dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek Landasan Hukum, aspek Kelembagaan dan SDM, aspek Penerapan Teknologi dan Pembangunan Aplikasi SIAK, aspek Registrasi, aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat belum berjalan dengan maksimal.

Penelitian sebelumnya yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Emilia Pamungkas Sari, 2021, dengan judul implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (siak) berdasarkan pemendagri nomor 7 tahun 2019 (studi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jombang). Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang sudah berjalan dengan cukup baik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokus penelitiannya di aceh utara sedangkan Lestari, Florence Daicy Jetty Lengkong, Gustaaf. B. Tampi locus penelitiannya di Manado. Wahyu Alexandi Giawa locus penelitiannya di kabupaten nias selatan. Jon Fredi Purba locus penelitiannya di Kota Medan. Hamka Digjaya, locus penelitiannya di kabupaten sambas. Dan Emilia Pamungkas Sari locus penelitiannya di kabupaten jombang.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Pelayanan Penerbitan Ktp-Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh

II. METODE

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang memudahkan dalam mengeksplorasi serta mendeskripsikan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan induktif yang kemudian menghasilkan suatu gagasan dan kesimpulan. Peneliti memahami penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan suatu penelitian yang fokus mendeskripsikan peristiwa yang terjadi secara sistematis, logis dan obyektif agar dapat menyelesaikan permasalahan.

Pada penelitian ini peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan data yang berasal dari data primer serta data sekunder. Penelitian yang dilakukan kali ini dalam menentukan informan menggunakan teknik *purposive* dan teknik *snowball sampling* dengan informan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Aceh Utara, Kepala Seksi Identitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara, Staff Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara yang masing masing 1 (satu) orang , Masyarakat Yang Ingin Membuat KTP-el 7 (tujuh)orang

Instrumen-instrumen penunjang untuk memudahkan peneliti saat melakukan penelitian seperti pada saat melakukan wawancara yang diperlukan ialah Wawancara dan alat perekam, termasuk pada saat melakukan observasi dan dokumentasi serta instrumen-instrumen penunjang lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni menggunakan pendapat Miles et all, (2014: 31) yaitu : *Data condensation* (Kondensasi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Concluding Drawing / Verification*. Penelitian ini dianalisis berdasarkan kriteria pengukuran implementasi menurut Thomas R.Dye (2017) yang terdiri dari: organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, ketersediaan personil, sumber daya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Pelayanan Penerbitan Ktp-Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh

3.1.1 Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana ialah sebuah organisasi yang melaksanakan atau menjalankan sebuah kebijakan. Dalam organisasi pelaksana terdiri atas tiga indikator yaitu Besaran organisasi, kejelasan fungsi dan Hubungan kerja. Berdasarkan hasil wawancara bahwa besaran organisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara termasuk organisasi yang sudah kompleks yang mana dari landasan atau payung hukum yang sudah jelas dan juga struktur organisasi yaitu jumlah pegawai yang ada terbagi merata ke dalam bidang-bidang yang ada dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Kemudian terkait kejelasan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Utara sudah sangat jelas dan sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Selanjutnya dalam melakukan berbagai hubungan kerja sama dengan dinas atau badan lain agar kebijakan SIAK ini dapat berjalan dengan lancar meningkatkan pendataan serta memberikan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat.

3.1.2 Pedoman atau Aturan

Pedoman atau aturan di dalam sebuah kebijakan dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Dalam dimensi ini terdiri atas tiga indikator yaitu kejelasan arahan, konsistensi, dan penerapan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pedoman atau aturan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara termasuk pedoman yang sudah kompleks yang mana dari landasan atau payung hukum yang sudah jelas dengan jumlah pegawai yang ada terbagi merata ke dalam bidang-bidang yang ada dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Kemudian terkait Konsistensi berkaitan dengan kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh pelaksana, hal ini berarti bahwa perintah-perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh saling bertentangan. Konsistensi pelaksana dalam menjalankan kesinambungan dan keselarasan mewujudkan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaannya.

Sedangkan dalam penerapan dari aturan terkait mekanisme prosedur pendataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara sudah baik dan sudah dijalankan oleh para implementor yang ada dengan tetap berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada.

3.1.3 Ketersediaan Personil

Dalam menjalankan sebuah kebijakan tentunya diperlukan personil atau sumber daya manusia yang melaksanakan. Dalam dimensi ini terdiri dari dua indikator yaitu jumlah dan kualitas dari personil yang ada. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapatkan bahwa untuk ketersediaan personil atau jumlah pegawai dalam pelaksanaan pelayanan SIAK sendiri masih kurang dan hanya terdiri dari 4 orang pegawai, hal ini tentunya dapat mengganggu dalam pelaksanaan pendataan SIAK.

3.1.4 Sumber Daya

Sumber daya dalam menjalankan sebuah kebijakan sangat diperlukan serta sangat menunjang dalam pengimplementasian sebuah kebijakan. Dalam dimensi ini Sumber daya terbagi atas dana atau anggaran, logistik, dan teknologi informasi. Dimensi sumber daya memiliki dua indikator yaitu alokasi atau peruntukan dan ketepatan penggunaan.

Untuk sumber daya sendiri masing-masing banyak terjadi kekurangan ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui terkait Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan.

Kemudian terjadi masalah sumber daya yang lain seperti kurangnya kemampuan dan terbatasnya personil dalam pelayanan pendataan SIAK maka adapun upaya yang dilakukan dinas yaitu dengan melakukan diklat, pelatihan atau bimbingan kepada pegawai yang ada terkait mekanisme prosedur pelayanan SIAK sehingga pegawai mendapatkan pemahaman serta memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan pelayanan dan tentunya dengan

adanya pelatihan atau bimbingan yang dilaksanakan membuat pegawai yang memahami terkait pelayanan SIAK menjadi banyak dan akan menghindari terjadinya kekurangan personil lagi.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Aceh Utara

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Aceh Utara antara lain:

- a. Besaran organisasi yang mencakup jumlah keseluruhan pegawai serta dasar hukum yang jelas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara
- b. Kejelasan fungsi pelaksanaan administrasi kependudukan yang sudah jelas dan diatur di dalam peraturan
- c. Hubungan kerja yang dilakukan terkait kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sudah berjalan dengan baik
- d. Kejelasan arahan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah baik
- e. Konsistensi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sudah baik
- f. Penerapan dari mekanisme pendataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang sudah baik dan sesuai SOP
- g. Anggaran dalam pelaksanaan Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang sudah cukup yakni sudah dianggarkan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah
- h. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah memadai

Sedangkan faktor penghambat dari implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Aceh Utara yaitu sebagai berikut:

- a. Terbatasnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara dalam pelayanan SIAK
- b. Kurangnya Kompetensi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara dalam pelayanan SIAK
- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan Kegagalan pendaftaran SIAK melalui pendaftaran secara online

3.3 Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Aceh Utara

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Aceh Utara diantaranya:

- a. Melakukan Pelatihan, diklat atau bimbingan kepada para pegawai yang ada sehingga dengan adanya pendampingan atau pelatihan bagi pegawai maka dapat menambah kemampuan serta kompetensi pegawai.
- b. Melakukan sosialisasi baik secara langsung atau melalui media sosial secara intensif kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan melakukan jemput bola sehingga Kebijakan SIAK ini dapat diketahui oleh seluruh

- masyarakat.
- c. Melakukan evaluasi dari sistem pelayanan online dan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk-spanduk terkait pelayanan online dan penyediaan tempat pengaduan berbagai keluhan masyarakat dalam proses pembuatan dokumen kependudukan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Masalah yang terjadi di sejumlah warga mengeluhkan lambatnya proses pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang menghabiskan waktu lebih sepekan. Salah seorang warga Kecamatan Tanah Luas mengajukan berkas pengurusan KTP-el, pihak pegawai kantor langsung menyampaikan kepada warga tersebut “bahwa KTP-el akan diproses dan selesai selama sembilan hari”. Sehingga zona standar pelayanan publik perlu dipertanyakan

IV. Kesimpulan

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Aceh Utara seperti besaran organisasi, kejelasan fungsi, hubungan kerja, kejelasan arahan, konsistensi, penerapan anggaran, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah baik dan sesuai SOP. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Aceh Utara yaitu sebagai seperti terbatasnya pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten aceh utara dalam pelayanan siak, kurangnya kompetensi pegawai, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kegagalan pendaftaran siak melalui pendaftaran secara online. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Aceh Utara seperti : melakukan pelatihan, melakukan sosialisasi baik secara langsung atau melalui media sosial, melakukan evaluasi dari sistem pelayanan online.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Aceh Utara

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Dinas Pencatatan sipil kependudukan Kabupaten Aceh Utara yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abidin, Said Zainal (2002) *Kebijakan public*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah
- Afrizal. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja grafindo
- Cairney, Paul. (2012) *Understanding Public Policy Theories and Issues*. China: Palgrave Macmillan
- Dye ,Thomas R (1992) *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall
- Hamdi, Muchlis. (2014) *Kebijakan Publik Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2013 *Kepemimpinan birokrasi*. Jakarta Barat: Alfabeta
- Tingkilisan, Hessel Nogi S. (2003) *Kebijakan Publik*. Makassar ; Balairung.
- Hutahaean, Marlan (2008) *Pengantar Studi Kebijakan Publik*, Bandung ; Pustaka Sutra
- Indrayani, Etin. (2016). *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) : Konsep, Perancangan, dan Implementasinya di Indonesia*. Jatinangor : Literatur IPDN.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. United States of America: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. United States of America: Pearson
- O'Sullivan, Elizabethann, Gary Rassel, Maureen Berner, & Jocelyn De Vance Taliaferro. (2017) *Research Methods for Public Administrators: Sixth Edition*. New York: Routledge
- Nugroho D. Riant (2003) *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suntoro Irawan, Hariri Hasan (2015) *Kebijakan public*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wahyuni, Sri. (2012). *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat
- Joko, Widodo. (2010) *Analisis Kebijakan Publik [Buku]*. - Malang : Bayumedia.
- William N. Dunn. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Edisi Kedua* ; Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Zuldafridal. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

C. Jurnal-jurnal

- Hamka Digjaya. (2009). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam rangka pembuatan ktp nasional di kabupaten sambas.
- Lestari, Florence Daicy Jetty Lengkong, Gustaaf. B. Tampi. (2016). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
- Wahyu Alexandi Giawa. (2018). Implementasi sistem informasi Administrasi kependudukan (siak) dalam proses pelayanan di dinas kependudukan dan Catatan sipil di kabupaten nias selatan.
- Jon Fredi Purba. (2018). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- Emilia Pamungkas Sari. (2021). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan pembedagri nomor 7 tahun 2019 (studi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jombang).

D. Sumber Lain/Elektronik

- PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI 2022 (Data olahan)
<http://portalsatu.com/read/news/pembuatan-ktp-di-disdukcapil-acehutara-habiskan-waktu-lebih-sepekan-dinilai-tak-sehat-54978>).
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/14256>
- <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1734/Wahyu%20Alexandi%20Giawa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/9375/1/Jon%20Fredri%20Purba%20-%20Fulltext.pdf>
- <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/10040/>
- <http://eprints.ubhara.ac.id/1141/1/Jurnal%20Emilia.pdf>
- <https://onsearch.id/Author/Home?author=Hessel+Nogi+S.+Tangkilisan>
- <https://onsearch.id/Record/IOS2720.slims-2841>